

## Analisis Kontribusi, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang

Nor Rifan Hidayat Habibi<sup>1</sup>

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia<sup>1</sup>

Email: nrh.habibi23@gmail.com<sup>1</sup>

### INFO ARTIKEL

*Volume 4*  
*Nomor 3*  
*Bulan Maret*  
*Tahun 2022*  
*Halaman 159-164*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Anggaran Pendapatan, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (APBD) serta sektor-sektor mana saja dari PAD yang sebaiknya dikembangkan dalam meningkatkan PAD di Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya setelah melakukan perhitungan dan menganalisa data, maka mendapatkan hasil bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Lumajang pada periode 2016-2020, mencapai 9,93% dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang dari tahun 2016 sampai 2020 dengan kategori kemampuan keuangan daerah sangat kurang. Perhitungan dan analisa data untuk kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang periode 2016-2020, mencapai 18,9% dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Daerah (PD) terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020 dengan kategori kemampuan keuangan daerah kurang. Perhitungan dan analisa data untuk kontribusi Retribusi Daerah (RD) terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dengan rata-rata 21,97 dengan kategori kemampuan keuangan daerah kurang. Pertumbuhan PAD Kabupaten Lumajang periode 2016-2020 mengalami penurunan dan peningkatan, mencapai rata-rata sebesar 14,7%, jadi angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Lumajang 2016-2020 sudah cukup baik. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lumajang harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menjadikan PAD sebagai sumber penggerak pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi PAD sebaik mungkin.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**

### ABSTRACT

*The purpose of study is to find out how the contribution of regional and local taxes to the budget and regional expenditures (APBD), local revenue (PAD), and which sectors of PAD should be development in increasing PAD in the district government*

*Lumajang. Furthermore, after performing calculations and analyze data, then get the result that the contribution of PAD to APBD Government of Lumajang in the period 2016-2020, reaching an average of 9,93%, from the numbers can be concluded that the contribution of revenue (PAD) to the State Budget and Expenditure (budget) Lumajang from 2016 to 2020 with a Fiscal capacity category very less. Calculation and data analysis for local tax contribution to PAD Government Lumajang period 2016 to 2020, reaching an average of 18,9% of these figures it can be concluded that the contribution of local taxes (PAD) against budget (APBD) Government Lumajang from 2016 to 2020 with a fiscal capacity category less. Calculation and data analysis for contribution levies (RD) against local taxes (PAD) from 2016 to 2020 increased significantly an average 21,97%with a fiscal capacity category less. Growth PAD Government Lumajang period 2016 to 2020 decline and rise, reaching average 14,7% so from these figures it can be concluded that the revenue growth from 2016-2020 are levies and other legitimate PAD. To improve the financial capability o Lumajang region should work to improve the original income and make the PAD as driving source of economic growth with potential af PAD as possible.*

**Keywords:** *Local revenue (PAD) and local government budget (APBD)*

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah-daerah propinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Daerah Otonom di Indonesia menghadapi fenomena dan permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan daerah otonom yang lain, khususnya yang terkait dengan isu-isu kemandirian daerah. Masalah kemandirian daerah berkaitan erat dengan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Lumajang mampu mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur PAD Kabupaten Lumajang tidak jauh berbeda dengan daerah lain, antara lain meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak menurut Soemitro (2015), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Sambodo (2015:7) ada lima fungsi pajak, yaitu (1) budgetair, (2) Fungsi mengatur, (3) Fungsi stabilitas, (4) Fungsi retribusi pendapatan, (5) Fungsi demokrasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009: 12). Sedangkan dalam pasal 1 ayat 65 Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untu kepentingan orang pribadi atau Badan.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu, terutama penelitian Ardinitia (2012) yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah terletak pada penambahan variabel, tahun penelitian dan obyek penelitiannya. Ardinitia (2012) melakukan penelitian tahun 2012 dengan obyek penelitian Pemerintah Kota Surabaya yang tergolong sebagai kota besar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan obyek penelitian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang sebagai kota kecil.

Berdasarkan pemikiran tersebut yang dilandasi oleh beberapa pendapat secara teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi, Retribusi Daerah Serta Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang”.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran mengenai kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang. Obyek penelitian ini adalah keuangan dari Dinas Retribusi Daerah dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkopi dokumen yaitu: komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan retribusi daerah, pajak daerah pendapatan asli daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) tahun anggaran 2016 sampai 2020 Kabupaten Lumajang.
- b. Mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh sebagai dasar untuk mengukur bagai mana dalam pembahasan penelitian ini.
- c. Menghitung dan menganalisis data ke dalam tabel.
  - Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah  
Dengan menggunakan analisis kontribusi PAD kita dapat melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai yang ditargetkan. Besar PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- Analisis kontribusi Pajak Daerah

$$\text{Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

- Analisis kontribusi Retribusi Daerah

$$\text{Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

- Analisis Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang. Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk membandingkan data-data antara tahun sebelumnya yaitu menggunakan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari period eke periode berikutnya (Halim,2008:241). Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan:

$$\text{Rasio pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$$

Realisasi Penerimaan PAD  $X_n - 1$

Keterangan:  $X_n$  : Tahun yang dihitung

$X_{n-1}$  : Tahun sebelumnya

Tabel 3.1

Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% – 30%	Sedang
30,00% – 40%	Cukup Baik
40,00% – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327

- Menyimpulkan atas rangkaian analisis data dan informasi yang disajikan, sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang

## RESULTS AND DISCUSSION

### Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pemerintah Kabupaten Lumajang dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 memberikan kontribusi 18,29% yang termasuk dalam kriteria nilai kontribusi pajak daerah kurang, dan kontribusi tersebut naik pada tahun 2017 memberikan kontribusi 18,52% naik sebesar 0,23% yang termasuk dalam kriteria nilai kontribusi pajak daerah kurang. Pada tahun 2017-2018 rasio kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 memberikan kontribusi 18,52% yang termasuk dalam kriteria nilai kontribusi pajak daerah kurang dan kontribusi tersebut turun pada tahun 2018 memberikan kontribusi 18,28% turun sebesar 0,24% yang termasuk dalam nilai kontribusi pajak daerah yaitu kurang. Rasio kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pemerintah Kabupaten Lumajang dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan terbesar yaitu pada tahun 2013 Pajak Daerah memberikan kontribusi 18,28% yang termasuk dalam nilai kontribusi pajak daerah kurang dan kontribusi tersebut naik pada tahun 2018 memberikan kontribusi 19,88% naik sebesar 1,6% termasuk nilai kontribusi pajak daerah kurang. Kemudian pada tahun 2019-2020 rasio kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pemerintah Kabupaten Lumajang kembali mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 memberikan kontribusi 19,88% yang termasuk nilai kontribusi pajak daerah kurang juga, dan kontribusi tersebut turun pada tahun 20120 memberikan kontribusi 19,53% turun sebesar 0,35% termasuk pula nilai kontribusi pajak daerah kurang, dengan rata-rata kontribusi pajak daerah

terhadap PAD Kabupaten Lumajang dari tahun 2016-2020 sebesar 23,33% dan diklasifikasikan kriteria nilai kontribusi pajak daerah yaitu kurang.

#### **Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD pemerintah Kabupaten Lumajang dari tahun 2016-2020, mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 memberikan kontribusi 23,20% yang termasuk dalam kriteria nilai kontribusi retribusi daerah yaitu sedang, dan kontribusi tersebut turun pada tahun 2017 memberikan kontribusi 22,42% turun sebesar 0,78% yang termasuk dalam kriteria nilai kontribusi retribusi daerah sedang. Pada tahun 2017-2018 rasio kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan terbesar yaitu pada tahun 2017 memberikan kontribusi 22,42% yang termasuk dalam kriteria nilai kontribusi retribusi daerah yaitu sedang, dan kontribusi tersebut naik pada tahun 2018 memberikan kontribusi 24,66% naik sebesar 2,24% termasuk dalam kriteria nilai kontribusi retribusi daerah yaitu sedang, dan rasio kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lumajang dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan kembali yaitu pada tahun 2018 Retribusi Daerah memberikan kontribusi 24,66% kontribusi tersebut turun pada tahun 2019 memberikan kontribusi 24,15% turun sebesar 0,51% yang termasuk dalam kriteria nilai kontribusi retribusi daerah kurang. Pada tahun 2019-2020 rasio kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami penurunan terbesar yaitu pada tahun 2019 memberikan kontribusi 24,15% dan kontribusi tersebut turun pada tahun 2020 memberikan kontribusi 15,45% turun sebesar 8,7% ini termasuk dalam kriteria nilai kontribusi retribusi daerah sedang. Rata-rata untuk kontribusi retribusi pajak daerah dari tahun 2016-2020 yaitu 21,97% yang diklasifikasikan kriteria nilai kontribusi retribusi daerah yaitu sedang.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kontribusi Pajak Daerah (PD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2016 sampai 2020, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan klasifikasi kriteria nilai kontribusi pajak daerah masih kurang dan terendah terjadi pada tahun 2018 dengan klasifikasi kriteria nilai kontribusi pajak daerah kurang. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2016-2020 membuktikan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020 yaitu kurang.

Sedangkan untuk kontribusi Retribusi Daerah (RD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2016 sampai 2020, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan klasifikasi kriteria nilai kontribusi retribusi daerah sedang dan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan klasifikasi kriteria nilai kontribusi retribusi daerah yaitu kurang. Rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD tahun 2016-2020 membuktikan bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020 yaitu sedang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2007 . *Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah* . Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN . Yogyakarta
- Abdul Halim. 2007 . *Akuntansi Keuangan Daerah* . Edisi Ketiga . Salemba Empat . Jakarta
- Amri Siregar (2009) . *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara* . Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara . Medan.
- Devas, Nick, at all. 1989 . *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* . Penerbit Universitas Indonesia . Jakarta
- Dwirandra . 2008. *Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 200 -2006*. Jurnal Akuntansi Bisnis . Volume III, No. 2 Juli 2008 . Halaman 133 – 143
- Gunadi, djoned . 2005 . *Administrasi Pajak* . BPPK Departemen Keuangan R.I Jakarta
- Halim, Abdul. 2007 . *Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta : Salemba Empat

- Huseini, Martini dan Hari Lubis . 1997 . *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. PAU Universitas Indonesia . Jakarta .
- Indra Bastian . 2001 . *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* . Edisi Pertama . BPFE, UGM . Yogyakarta
- Iskandar . 2008 . *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* . Gaung Persada Group . Jakarta.
- Lutfi, Achmad . 2006 . *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi . Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mahmudi, 2007 . *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah* . Edisi Pertama . Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Manssury, R. 1994 . *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia* . Bina Rena Pariwara . Jakarta .
- Mardiasmo . 2002 . *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* . Andi Offset . Yogyakarta
- Mudrajat Kuncoro. 2004 . *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang* . Jakarta :Penerbit Airlangga
- Noviansyah Rizal dan Shelly Helen Kaonel. 2014. *Sistem dan Prosedur Pembayaran Retribusi Perizinan Usaha*. *Jurnal Wiga*, Vol. 4, No 2088-0944
- Nuansa, Fajar. 2012 . *Efektifitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)* . FISIP Universitas Indonesia. Jakarta
- Oyong Lisa. 2016. *Penghindaran Pajak pada Koperasi Syari'ah Indonesia*. *Jurnal Wiga*, Vol 2, No 1
- Rosdiana, Haula & Rasin Taringan . 2005 . *Perpajakan, Teori dan Aplikasi* . PT. Grafindo Persada . Jakarta
- Republik Indonesia . *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Riduansyah, Mohammad.2003. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)* . Makara, Sosial Humaniora . Volume VII, No. 2 Desember 2003. Halaman 49 - 53
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih . 2008 . *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Volume VII, No. 2 September 2008. Halaman 162-173
- Sidik, Mahmud dan Suwondo. 1996. *Keuangan Daerah*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Juli Panglima Saragih, 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Edisi Pertama. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Malang : Lembaga Penerbit dan Dokumentasi FIA Unibraw
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sunyoto dan Ery Hidayati. 2011. *Pelimpahan Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pedesaan & Perkotaan dan BPHTB antara peluang dan tantangan*. *Jurnal Wiga*, Vol.2 No.2088-0944.
- Richard Holloway. 2001. Menuju Kemandirian Keuangan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia, *Departemen Dalam Negeri*. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia , 2004 . *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*